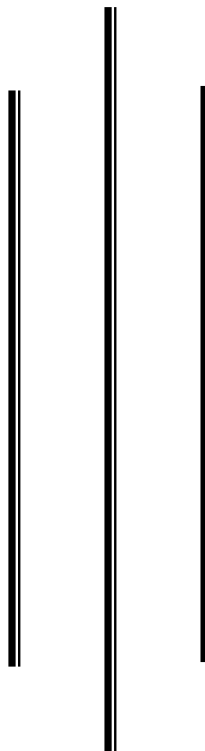


# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023



## **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

JL. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH (Komplek Islamic Center)  
Muara Enim Telp. (0734) 421099 Fax.422226  
Muara Enim 31311

## KATA PENGANTAR


Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tahun 2023 disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu tahun 2023. Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan/Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim serta Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada Tahun 2023 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim di Tahun 2023.

Muara Enim,      Februari 2024

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MUARA ENIM



**SUHERMANSYAH, ST.,M.Eng.,CGCAE**  
PEMBINA TK.I / (IV/b)  
NIP: 19720820 200501 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim selama tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan/Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat 4 (Empat) Sasaran Strategis, yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentas Capaian Kinerja(%)
1.	Meningkatnya Keandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Guna Kelancaran Transportasi Barang dan Jasa dengan Indikator Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik	1. Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik	97,63 %
2.	Meningkatnya Jaringan Irigasi Guna Menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian dan budi daya	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim Dalam Kondisi Baik (IKSI)	74,57 %

3.	Terwujudnya Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi serta Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Penata Bangunan	3. Persentase/Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Tata Bangunan Sesuai dengan Fungsinya	70,00%
4.	Terwujudnya Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang	4. Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Realisasi	100%

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan sasaran strategis sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Struktur Organisasi	2
1.5 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi	6
2.2 Misi	7
2.3 Tujuan dan Sasaran	7
2.4 Matriks Penetapan/Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2 Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2023. Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Guna memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang – undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang – undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Undang – undang No. 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
- f. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.

### **1.4 STRUKTUR ORGANISASI**

Didalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan dan Pengairan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim juga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Pembangunan dan pengelolaan, Pembinaan Umum, Pemberian Bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati
2. Pengawasan, pengendalian, teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan bupati;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi pengairan, dan keciptakarya.
4. Pengelolaan tata dinas;
5. Pengelolaan dan pembinaan pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas.

Didalam menjalankan kegiatannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program, merumuskan kebijakan, memberi rekomendasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, administrasi ketatalaksanaan tugas kedinasan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Uraian tugas tersebut dimaksud sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
3. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Mengelola kesekretariatan meliputi, perencanaan, umum dan keuangan;
6. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;



7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengadaan perlengkapan rumah tangga dinas, kearsipan, pengadaan perlengkapan rumah tangga dinas, kehumasan, perjalanan dinas dan pelaporan. Uraian tugas tersebut dimaksud sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan koordinasi, mengolah data dan menyusun program kerja di lingkungan dinas;
2. Menyiapkan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Mengelola administrasi kepegawaian;
4. Mengelola perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;
5. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor;
6. Menyiapkan bahan fasilitasi advokasi dalam bidang bina marga dan pengairan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program;
8. Penataan Organisasi Tata Laksana ;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

## **1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Struktur Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

### **Bab II : Perencanaan kinerja**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Matriks Penetapan/Perjanjian Kinerja

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

### **Bab IV : Penutup**

### **Lampiran**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 VISI**

Dalam hal mencapai suatu tujuan diperlukan adanya perencanaan dan tindakan yang nyata. Untuk dapat mewujudkannya, didalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan maka dibuatlah Visi dan Misi. Adapun Visi Dinas adalah pandangan atau wawasan kedepan untuk menentukan arah organisasi. Dari visi tersebut dapat diketahui cita – cita dan gambaran organisasi dimasa depan yang diharapkan dapat tercapai

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

***“ Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya jalan Tol Muara Enim – Indralaya – Palembang, Memanfaatkan potensi SDA untuk memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Industri dengan memperhatikan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan “***

Adapun makna dari visi diatas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim adalah dengan melakukan pembangunan secara Merata dan Berkualitas serta dengan mendukung terwujudnya Pembangunan Jalan Tol Muara Enim – Indralaya – Palembang, dan memberikan pelayanan bangunan infrastruktur di bidang kebinamargaan, ciptakarya, dan jaringan pengairan yang berguna dan berkualitas sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna infrastruktur serta dapat dimanfaatkan dan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, juga memanfaatkan potensi SDA untuk memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Industri dengan Memperhatikan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan.

## 2.2 MISI

Misi adalah seluruh kebijakan, strategi dan program yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi menegaskan visi lewat pilihan atau garis besar yang akan diambil untuk sampai pada visi yang lebih dulu dirumuskan.

Untuk menjalankan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai enam misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Jalan, Jembatan dan Irigasi untuk mengembangkan Wilayah dan Kelancaran Transportasi Barang dan Jasa;
2. Mewujudkan Tata Ruang Terpadu yang Berpedoman Pada Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
3. Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Berdasarkan Asas Manfaat, Keselamatan dan Keseimbangan;
4. Meningkatkan Tata Kelola Yang Baik Bagi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Meningkatkan dan Membina Keterampilan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Kebinamargaan, Keciptakarya dan Penataan Ruang.

## 2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Muara Enim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki visi dan misi yang menunjang dimana didalamnya terdapat program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kegiatan yang dipilih untuk program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan dan dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Adapun program – program Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang adalah sebagai berikut :

**Tujuan 2.3.1** : Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan kabupaten yang berkualitas.

**Sasaran 2.3.1.1** : Meningkatnya keandalan infrastruktur jalan dan jembatan guna kelancaran transportasi barang dan jasa.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- b. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- c. Pengelolaan Leger Jalan
- d. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- e. Pembangunan jalan
- f. Pelebaran Jalan Menuju Standar
- g. Rekonstruksi Jalan
- h. Rehabilitasi Jalan
- i. Pemeliharaan Rutin Jalan
- j. Pembangunan Jembatan
- k. Penggantian Jembatan
- l. Rehabilitasi Jembatan
- m. Pemeliharaan Rutin Jembatan
- n. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

**Tujuan 2.3.2.** : Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi.

**Sasaran 2.3.2.1** : Meningkatnya fungsi jaringan irigasi guna menunjang sistem pengairan lahan pertanian.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
  - a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, embung dan bangunan penampung air Lainnya
  - b. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
  - c. Pembangunan Check Dam
  - d. Normalisasi/Restorasi Sungai
  - e. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
  - f. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/kota
  - g. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
  - h. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
  - i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
  - j. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
  - a. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

c. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

**Tujuan 2.3.3** : Mewujudkan Terselenggaranya IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

**Sasaran 2.3.3.1** : Persentase Bangunan Gedung dan lingkungan atau Kawasan yang sesuai dengan intensitas dari pemanfaatan ruang

1. Program Penataan Bangunan Gedung

a. Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan

b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah kabupaten/Kota

c. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

d. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota

**Tujuan 2.3.4** : Proporsi Rumah Tinggal dengan Akses Bekelanjutan terhadap air minum, perkotaan dan perdesaan

**Sasaran 2.3.4.1** : Persentase Penduduk Berakses Air Minum

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

d. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

**Tujuan 2.3.4** : cakupan sistem pengelolaan sistem air limbah domestik

**Sasaran 2.3.4.1** : Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik

b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

c. Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

**Tujuan 2.3.4** : Mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan penyelenggaraan penataan ruang

**Sasaran 2.3.4.1** : Terwujudnya pembangunan yang selaras dengan penyelenggaraan penataan ruang :

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - a. Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
  - b. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  - d. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
  - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
  - f. Sistem Informasi Penataan Ruang
  - g. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
  - h. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

**Tujuan 2.3.5.** : Mewujudkan sektor jasa konstruksi sebagai pendukung atas prasarana aktifitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya bangunan yang berkualitas

**Sasaran 2.3.5.1** : Terwujudnya struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
  - a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  - b. Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
  - c. Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional

**Tujuan 2.3.6.** : Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muara Enim

**Sasaran 2.3.6.1** : Meningkatnya kinerja pelayanan

SKPD. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## 2.4 MATRIKS PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Tabel 1. Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keandalan infrastruktur jalan dan jembatan guna kelancaran transportasi barang dan jasa	Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik	95,33%
2.	Tersedianya Infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan lumbang pangan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	71,09%



3.	Terwujudnya pembangunan yang selaras dengan penyelenggaraan penataan bangunan dan jasa konstruksi serta meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang penata bangunan	Persentase/Jumlah gedung Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan sesuai dengan fungsinya	70,00%
4.	Terwujudnya pembanguna yang selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Realisasi	100%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023.

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja pada dasarnya adalah uraian kinerja setiap sasaran, lalu diuraikan secara tuntas mulai dari perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sasaran serta evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja.

Dalam penjelasan evaluasi pencapaian indikator kinerja juga memuat tentang perbandingan data kinerja, statistik/grafik, program dan kegiatan terkait, faktor – faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran,

hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan dihadapi.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **I. Meningkatnya Keandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Guna Kelancaran Barang dan Jasa**

Berikut ini ditampilkan data persentase realisasi dari sasaran Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Andal dengan Kondisi yang berkualitas :

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Keandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Guna Kelancaran Barang dan Jasa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Meningkatnya Keandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Guna Kelancaran Transportasi Barang dan Jasa	1. Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik	95,33%	93,07%	97,63%

Adapun penjelasan mengenai capaian sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### **I. Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik**

##### **I.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik pada Tahun 2023 mempunyai target sebesar 95,33%, dan yang terealisasi sebesar 93,07%. Persentase Kondisi Jalan yang Kualifikasi Baik pada Tahun 2023 didukung oleh Program – Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 diperoleh data panjang jalan kondisi baik di Kabupaten Muara Enim sepanjang 1.305,70 km meningkat dari tahun sebelumnya sepanjang 1.317,41 km sehingga terdapat peningkatan sebesar 11,71 km Data Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2023 diperoleh 1.415,40 Km

meningkat dari tahun sebelumnya sepanjang 1.407,15 km sehingga terdapat peningkatan sebesar 8,25 Km.

Permasalahan Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Baik dengan Sasaran Meningkatnya Keandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan guna kelancaran Transportasi Barang dan Jasa tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan :

1. Semakin bertambahnya jalan yang mengalami kerusakan
2. Banyaknya kegiatan pembukaan jalan baru yang kondisinya masih perlu ditingkatkan, hal ini belum dapat menunjukkan kondisi baik karena jalan tersebut berupa tanah/ lapis agregat.

Dengan adanya permasalahan yang menyebabkan target kinerja yang tidak tercapai pada Indikator Persentase Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Baik maka solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu :

1. Lebih memprioritaskan perbaikan jalan yang mengalami kondisi rusak parah untuk dimasukkan dalam program rehabilitas/pemeliharaan jalan
2. Segera meningkatkan jalan baru yang telah dibuka agar menjadi kondisi jalan yang baik misalnya jalan kondisi dengan lapis agregat menjadi lapis perkerasan berupa aspal atau beton.

$$\text{Persentase jalan kondisi baik} = \frac{\text{Panjang jalan kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang jalan seluruh kabupaten (Km)}} \times 100 \%$$

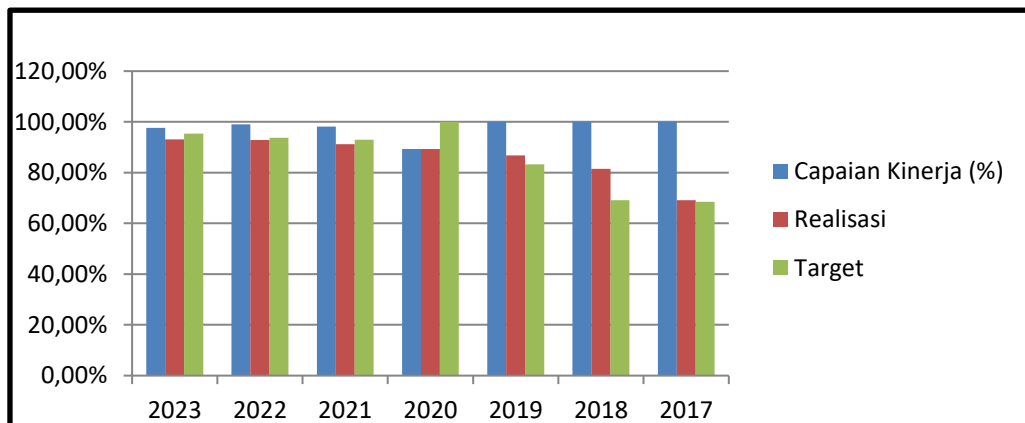
Tabel 3. Panjang jalan kondisi baik dan Panjang jalan di Kabupaten Muara Enim

Keterangan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan kondisi baik (Km)	953,24	967,87	1.211,16	1.248,19	1.277,70	1.305,70	1.317,41
Panjang jalan Kabupaten (Km)	1.379,10	1.383,505	1.386,505	1.396,51	1.400,68	1.407,68	1.415,40

Tabel 4. Target dan Realisasi Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2023	95,33%	93,07%	97,63%
2.	2022	93,75%	92,79%	98,97%
3.	2021	92,99%	91,22%	98,09%
4.	2020	100%	89,38%	89,38%
5.	2019	83,30%	86,80%	100%
6.	2018	69,12%	81,45%	100%
7.	2017	68,54%	69,12%	100%
8.	2016	68.31%	68.31%	100%

Grafik 1. Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik



## I.2. Program dan Kegiatan Terkait

Peningkatan Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik tidak terlepas dari program dan kegiatan yang mendukung peningkatan tersebut. Program dapat diartikan sebagai konsep *komprehensif* yang diwujudkan dalam aksi (*Action*) nyata yang dilakukan oleh perseorangan (*Person*) atau

kumpulan perseorangan (Lembaga, Badan, Dinas dan Instansi) untuk mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja yang dikolaborasikan sesuai dengan acuan prosedur pelaksanaan dengan tetap berlandaskan pada *Standar Operating Prosedur (SOP)*.

Adapun program – program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan peningkatan persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
  - b. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
  - c. Pengelolaan Leger Jalan
  - d. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
  - e. Pembangunan jalan
  - f. Pelebaran Jalan Menuju Standar
  - g. Rekonstruksi Jalan
  - h. Rehabilitasi Jalan
  - i. Pemeliharaan Rutin Jalan
  - j. Pembangunan Jembatan
  - k. Penggantian Jembatan
  - l. Rehabilitasi Jembatan
  - m. Pemeliharaan Rutin Jembatan
  - n. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

## II. Meningkatnya fungsi jaringan irigasi guna menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian

Berikut ini ditampilkan data persentase realisasi dari sasaran Meningkatnya fungsi jaringan irigasi guna menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian :

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Meningkatnya fungsi jaringan irigasi guna menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Tersedianya Infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan lumbu pangan	1. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	71,09%	53,01%	74,57%

Adapun penjelasan mengenai capaian sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

### I. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)

#### I.1 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini merupakan perbandingan dalam bentuk persentase yang membandingkan luas irigasi Kabupaten Muara Enim dalam kondisi baik dan dinyatakan dalam Ha dengan luas irigasi seluruh Kabupaten Muara Enim yang dinyatakan dalam Ha. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dalam Kondisi Baik pada Tahun 2022 sebesar 83,36% mengalami penurunan dari yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 71,09%. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dalam Kondisi Baik pada Tahun 2023 didukung oleh Program – Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 diperoleh data Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha) di Kabupaten Muara Enim berjumlah 12.995,23 Ha hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya memiliki luas sebesar 12.945,03 Ha sehingga terdapat peningkatan sebesar 50,2Ha.

Capaian Kinerja pada Indikator Meningkatnya Fungsi Jaringan Irigasi Guna Menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan :

1. Terjadinya bencana longsor pada saluran irigasi sehingga kondisi baik pada saluran irigasi berkurang
2. Kondisi geografis yang beragam dan area pertanian yang luas maka konstruksi dilakukan bertahap.

Untuk capaian target kinerja pada Indikator Kinerja Meningkatnya Fungsi Jaringan Irigasi Guna Menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian tidak memenuhi, maka solusinya adalah :

1. Memprioritaskan daerah irigasi yang mengalami longsor pada program rehabilitasi daerah irigasi
2. Memprioritaskan pembangunan jaringan irigasi baru sesuai kebutuhan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

$$\text{Persentase irigasi Kabupaten Muara Enim dala kondisi baik} = \frac{\text{Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi Kabupaten}} \times 100 \%$$

Tabel 6. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan Luas Irigasi di Kabupaten Muara Enim

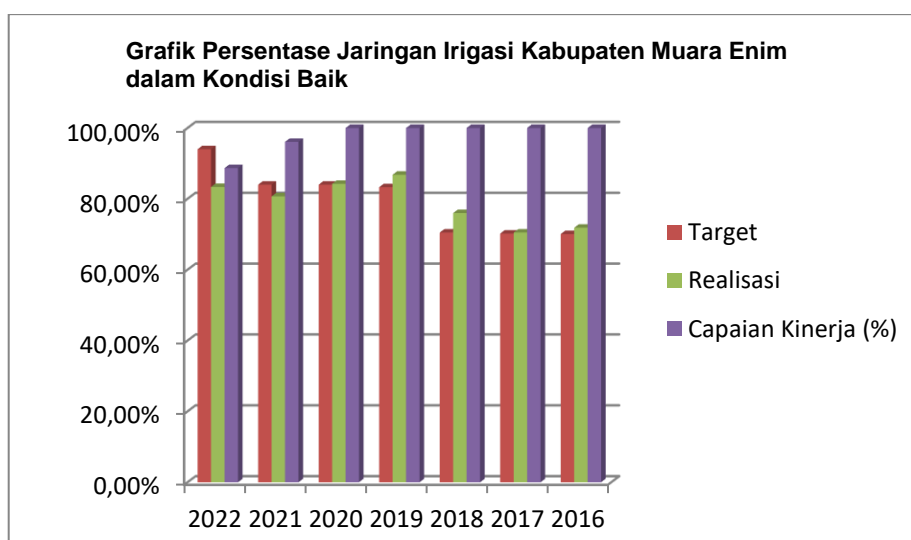
Keterangan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	10.826,00	10.987,00	12.070,00	12.016,20	12.945,30	12,995.23	12,995.23
Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	15.358,25	15.358,25	15.358,25	15.371,45	15,590,00	15,590.00	15,590.00



Tabel 7. Target dan Realisasi Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dalam Kondisi Baik

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2023	71,09 %	53,01 %	74,57 %
2.	2022	94,00%	83,36%	88,68%
3.	2021	84.00%	80,71%	96,08%
4.	2020	84,00%	84,25%	100%
5.	2019	83,30%	86,80%	100%
6.	2018	70.49%	76,00%	100%
7.	2017	70.20%	70.49%	100%
8.	2016	70.07%	71.84%	100%

Grafik 2. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dalam Kondisi Baik



## I.2 Program dan Kegiatan Terkait

Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dalam Kondisi Baik tidak terlepas dari program dan kegiatan yang mendukung peningkatan tersebut. Program dapat diartikan sebagai konsep *komprensif* yang diwujudkan dalam aksi (*action*) nyata yang dilakukan oleh perseorangan (*person*) atau kumpulan perseorangan (lembaga, badan, dinas dan instansi) untuk mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja yang dikolaborasikan

sesuai dengan acuan prosedur pelaksanaan dengan tetap berlandaskan pada *Standar Operating Prosedur (SOP)*.

Adapun program – program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dalam Kondisi Baik meliputi :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

- a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- b. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
- c. Pembangunan Check Dam
- d. Normalisasi/Restorasi Sungai
- e. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
- f. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
- g. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- h. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
- i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- j. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

**III. Terwujudnya Fungsi Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi serta Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Penata Bangunan**

Berikut ini ditampilkan data persentase realisasi dari sasaran Terwujudnya Fungsi Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi serta Meningkatnya Pelayanan Masyarakat di Bidang Penata Bangunan

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Terwujudnya Fungsi Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi serta Meningkatnya Pelayanan Masyarakat di Bidang Penata Bangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya Fungsi Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi serta Meningkatnya Pelayanan Masyarakat di Bidang Penata Bangunan	Persentase/Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Tata Bangunan Sesuai dengan Fungsinya	70,00%	63,45%	90,64%

I. Persentase / Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Bangunan Sesuai dengan Fungsinya.

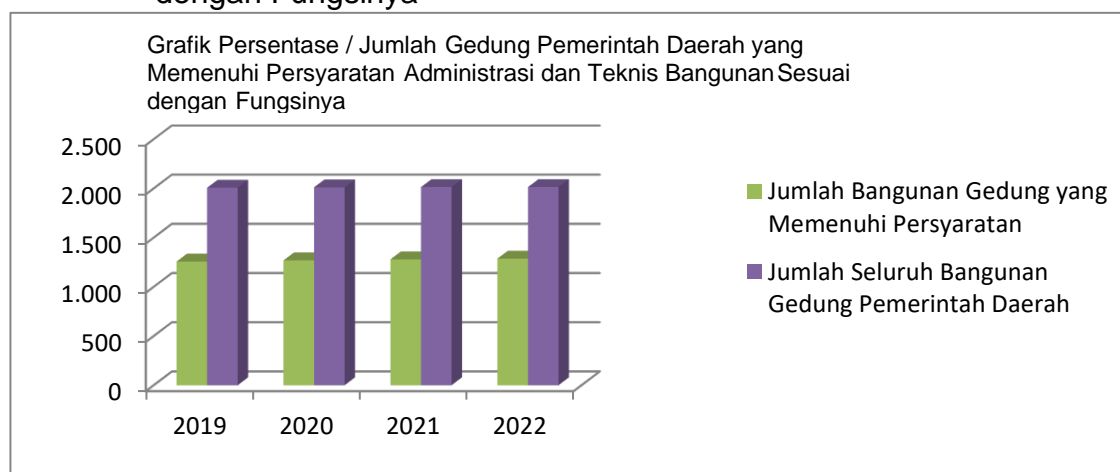
I.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Persentase / Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Bangunan Sesuai dengan Fungsinya pada Tahun 2023 mempunyai target sebesar 83,80%, dan yang terealisasi sebesar 63,45%. Persentase / Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Bangunan Sesuai dengan Fungsinya pada Tahun 2023 didukung oleh program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 diperoleh data jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan sebanyak 1.287 unit meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.279 unit, terdapat peningkatan sebesar 8 unit.

Tabel 9. Persentase / Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Bangunan Sesuai dengan Fungsinya.

Keterangan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bangunan Gedung yang Memenuhi Persyaratan	1.257	1.269	1.279	1.287
Jumlah Seluruh Bangunan Gedung Pemerintah Daerah	2.007	2.011	2.014	2.014

Grafik 2. Persentase / Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Bangunan Sesuai dengan Fungsinya



Adapun program – program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan Persentase Jumlah Seluruh Bangunan Gedung Pemerintah Daerah meliputi :

1. Program Penataan Bangunan Gedung

Yang mana Adapun sub kegiatan Sebagai berikut

- a. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBGPencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- c. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
- d. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

**IV. Terwujudnya Pembangunan yang selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Berikut ini ditampilkan data persentase realisasi dari sasaran Terwujudnya Pembangunan yang selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tabel. 10 . Pencapaian Kinerja Terwujudnya Pembangunan yang selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya Pembangunan yang selaras dengan penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan penataan ruang dengan realisasi	100%	100%	100%

- a) Persentase Terwujudnya Pembangunan yang selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang
- I.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

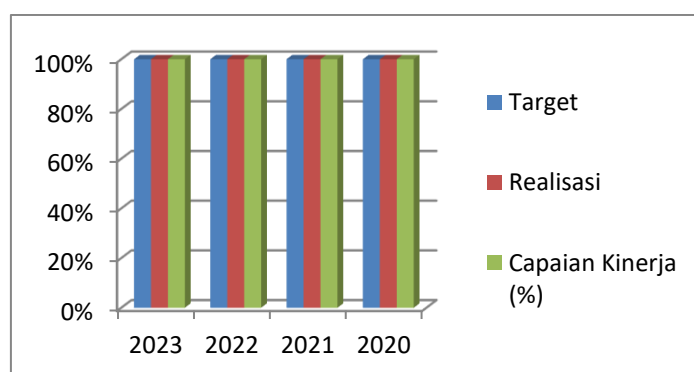
Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan penataan ruang dengan realisasi dengan Fungsinya pada Tahun 2023 mempunyai target sebesar 100%, dan yang terealisasi sebesar 100%. Persentase kesesuaian perencanaan

pembangunan dan penyelenggaraan penataan ruang pada Tahun 2023 didukung oleh program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Tabel. 11. Persentase Terwujudnya Pembangunan yang selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2023	100%	100%	100%
2.	2022	100%	100%	100%
3.	2021	100%	100%	100%
4.	2020	100%	100%	100%

Grafik 2. Persentase Terwujudnya Pembangunan yang selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang



Adapun program – program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkaitan dengan Persentase Jumlah Seluruh Bangunan Gedung Pemerintah Daerah meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Yang mana Adapun sub kegiatan Sebagai berikut

- a. Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

- d. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- f. Sistem Informasi Penataan Ruang
- g. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
- h. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

### III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Target Jangka Menengah

Berikut ini ditampilkan data perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dokumen renstra 2020 – 2023 :

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi capaian Tahun Ke- (%)				Target Capaian Setiap Tahun (%)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Keandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Guna Kelancaran Transportasi Barang dan Jasa	Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik	89,38	91,22	98,97	93,07	100	92,99	93,75%	95,33%
Meningkatnya fungsi jaringan irigasi guna menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dalam Kondisi Baik	84,25	80,71	88,68%	53,01	84,00	89,00	94,00%	71,09%
Terwujudnya Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi serta Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Penata Bangunan	Persentase/Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Tata Bangunan Sesuai dengan Fungsinya	63,00	63,03	78,35%	63,45	73,35	78.16	80,98%	70,00%



Terwujudnya Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Realisasi	-	100	100	100	-	100	100	100
--	---	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

#### IV. Faktor Hasil Capaian Sasaran

Tuntutan akan perkembangan Jaman membuat kebutuhan akan infrastruktur semakin meningkat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tuntutan untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap kebutuhan infrastruktur yang berkualitas dibidang penyediaan jalan, jembatan, pengairan dan tata ruang. Untuk memenuhi semua tuntutan diatas maka dalam proses penyelenggaraan kedepannya akan ada banyak tantangan seperti :

a. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas

Dalam mencapai tujuan sumber daya manusia adalah hal yang terpenting. Kedepannya hendaknya dilakukan peningkatan kualitas SDM misalnya melalui pelatihan – pelatihan teknis. Pembentukan manajemen perlu juga dilakukan karena selama ini koordinasi antar lini tidak berjalan sebagaimana mestinya;

b. Kurangnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan hal yang perlu dikembangkan;

c. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung;

d. Beban kendaraan yang melintas melebihi beban yang direncanakan;

Akibat banyaknya kendaraan barang yang melintas melebihi kapasitas seharusnya (*Overload*) menyebabkan banyak jalan menjadi cepat rusak. Jumlah kendaraan barang ini berkembang sangat signifikan.

e. Banyaknya jalan yang belum memiliki saluran drainase sehingga terjadi penggenangan air di jalan;

f. Kondisi geografis yang beragam sehingga banyak tempat sulit untuk dijangkau terutama lokasi pengairan.

Dengan adanya tantangan diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mempunyai peluang untuk pencapaian kedepan yaitu :

- a. Terciptanya sumber daya manusia yang handal dan berkualitas sehingga dapat membangun database pembangunan infrastruktur daerah;
- b. Meningkatnya kerjasama antara swasta dan masyarakat yang mana swasta mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan masyarakat mampu membantu memelihara sarana publik;
- c. Maksimalnya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga mampu menunjang kegiatan organisasi;
- d. Mendapatkan dukungan pendanaan dari kepala daerah serta *Stakeholders* dalam penyediaan infrastruktur;
- e. Meningkatnya pelayanan jaringan jalan yang lebih lancar, tertib dan selamat, serta mampu segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- f. Tersedianya semua jaringan irigasi sehingga tidak terjadi permasalahan air dalam pengairan sawah.

## **V. Kendala dan Permasalahan**

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian kinerja serta tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibagi menjadi dua yaitu faktor internal berupa kualitas sumber daya manusia yang kurang mendukung dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan faktor eksternal berupa kondisi geografis yang beragam dan iklim yang tidak menentu serta krisis kepercayaan terhadap aparaturnya.

Berdasarkan informasi capaian saat ini, standar yang digunakan dan faktor yang mempengaruhi maka didapatkan suatu permasalahan pelayanan OPD yaitu :

1. Kurangnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. Kondisi geografis yang beragam dan luasnya areal pertanian maka pembangunan jaringan irigasi dilakukan secara bertahap;
3. Iklim yang tidak menentu sehingga mempengaruhi dalam proses pembangunan;
4. Beban kendaraan yang melintas melebihi beban yang direncanakan;

5. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mendukung dalam proses pembangunan serta sarana dan prasarana yang menunjang dalam kelancaran pembangunan;
6. Banyaknya jalan yang belum memiliki saluran drainase.

## **VI. Langkah – Langkah Antisipatif**

Untuk menganalisa lingkungan strategis perlu dilaksanakan pemetaan interaksi faktor antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal dan berbagai perkiraan dan asumsi maka dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dengan menggunakan analisa SWOT dengan menggunakan kekuatan dan peluang untuk menghadapi tantangan dan kelemahan dengan cara – cara :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, perjenjangan dan pelatihan pegawai dalam bidang ke Binamargaan;
2. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Dinas melalui dukungan terhadap pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan teknologi;
3. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Dinas untuk mengantisipasi kemacetan lalulintas akibat kurang disiplinnya pengguna jalan;
4. Mempertahankan kondisi jalan yang sudah mantap dan pengembangan jaringan jalan secara efektif dengan memanfaatkan sentra – sentra produksi yang potensial;
5. Meningkatkan dana penyelenggaraan jalan dengan memberi peluang melalui investor;
6. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui dukungan PEMDA;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan kemajuan IPTEK;
8. Meningkatkan sosialisasi standar penanganan jalan melalui pelatihan Tenaga Kerja Bidang Jasa Konstruksi.

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

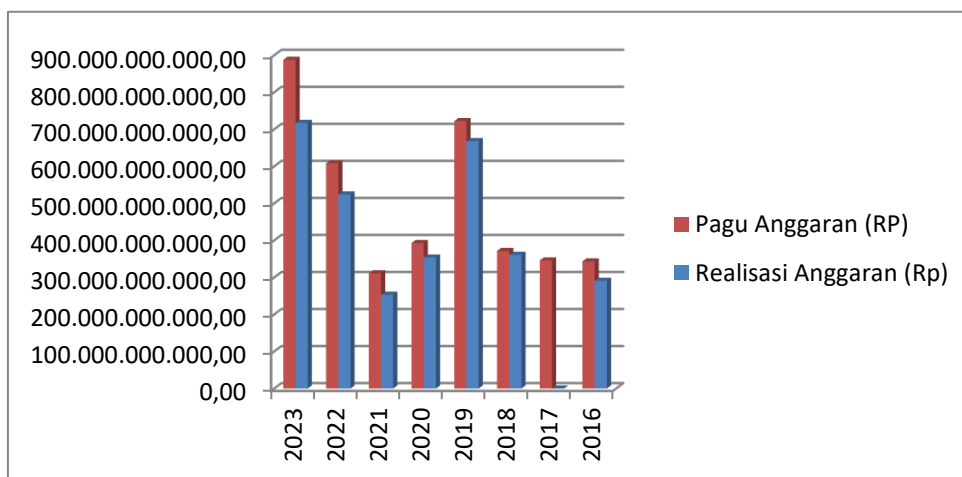
Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim di dukung pendanaan baik

yang diperoleh dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN. Berikut ini adalah tampilan pagu anggaran dan realisasi belanja langsung pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 22. Pagu Anggaran dan realisasi Belanja Langsung

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2023	887.764.618.108,00	717.268.124.804,00	80,79
2	2022	607.984.246.512,00	524.101.742.993,00	86,20
3	2021	311.008.950.365,00	253.329.120.311,53	81,45
4	2020	393.030.285.563,49	353.591.998.720,05	89,97
5	2019	722.135.066.525,00	668.181.990.171,64	92,53
6	2018	371.381.735.000,00	361.230.132.161,00	97,27
7	2017	345.976.325.396,43	340.932.017.704,43	98,54
8	2016	343.312.242.400,00	290.905.072.219,00	84,73

Grafik 8. Peningkatan Pagu Anggaran Belanja Langsung



Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Anggaran yang dialokasikan harus sejalan dengan target yang akan dicapai, walaupun pada akhir pelaksanaannya terdapat target kinerja yang tidak tercapai maka harus disertai

dengan alasan sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan dilapangan.

Kondisi pencapaian target kinerja akan dievaluasi baik target yang tercapai maupun yang belum tercapai sesuai dengan pencapaian *output* dan *outcome* yang dilaporkan . Hal ini berguna sebagai bagian dari evaluasi dokumen perencanaan yang akan datang.

Berikut ini adalah tampilan korelasi antara pagu anggaran program/kegiatan dan realisasinya yang dihubungkan dengan pencapaian target kinerja yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 23. Realisasi Pagu Anggaran dan Pencapaian Target Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Meningkatnya Keandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Guna Kelancaran Transportasi Barang dan Jasa dengan Indikator Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik	Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik	95,33%	93,07%	97,63%	505.849.916.574,00	76,31%
Meningkatnya Fungsi Jaringan Irigasi guna menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	71,09%	53,01%	74,57%	62.301.701.053,00	83,86%

Terwujudnya Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi serta Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Penata Bangunan	Persentase/ Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Tata Bangunan Sesuai dengan Fungsinya	70,00%	63,45%	90,64%	61.155.610.368,00	84,49%
Terwujudnya Pembangunan yang selaras dengan penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan penataan ruang dengan realisasi	100 %	100%	100%	4.660.490.628,00	94,31 %

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, keempat sasaran stratejik tersebut dapat berhasil dilaksanakan dengan sangat baik yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya Keandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Guna Kelancaran Transportasi Barang dan Jasa dengan Indikator Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik dengan Indikator Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik dengan Target 95,33% sementara realisasinya 93,07% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,63%
2. Sasaran Meningkatnya Fungsi Jaringan Irigasi guna menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian dengan Indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dengan target 71,09 % sementara realisasinya 53,01% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 74,57%
3. Sasaran Terwujudnya Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi serta Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Penata Bangunan dengan Indikator Persentase/Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Tata Bangunan Sesuai dengan Fungsinya dengan target 70,00% sementara realisasinya 63,45% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90,64%
4. Sasaran Terwujudnya Pembangunan yang Selaras dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Indikator Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Target 100% sementara realisasinya 100% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%.

# LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUARA ENIM

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya Keandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Guna Kelancaran Transportasi Barang dan Jasa	Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik	95,33%
2	Meningkatnya Jaringan Irigasi Guna Menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian Dan Budi Daya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	71,09%
3	Terwujudnya Pembangunan yang Selaras Dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jasa Kontruksi Serta Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Penata Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Bangunan Sesuai Dengan Fungsinya	70,00%
4	Terwujudnya Pembangunan yang Selaras Dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dengan Realisasi	100%

Muara Enim, Februari 2024

Plt.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MUARA ENIM



**SUHERMANSYAH, ST.M.Eng., CGCAE**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19720820 200501 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUARA ENIM

N0.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Keandalan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Guna Kelancaran Transportasi Barang dan Jasa	Persentase Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi Baik	95,33%	93,07%	97,63%
2	Meningkatnya Jaringan Irigasi Guna Menunjang Sistem Pengairan Lahan Pertanian Dan Budi Daya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	71,09%	53,01%	74,57%
3	Terwujudnya Pembangunan yang Selaras Dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jasa Kontruksi Serta Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Penata Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Bangunan Sesuai Dengan Fungsinya	70,00%	63,45%	90,64%
4	Terwujudnya Pembangunan yang Selaras Dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dengan Realisasi	100%	100%	100%

Muara Enim, Februari 2024

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MUARA ENIM



**SUHERMANSYAH, ST.M.Eng., CGCAE**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19720820 200501 1 004